

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, A. 2002. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Achmad Ali, S. H. .2015. *Menguak Tabir Hukum: Ed. 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Apeldoorn, L. V. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum (cetakan kedua puluh enam)*. Jakarta: Pradnya
- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari. 1999. *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Bernard Arief Sidharta. 2008. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama
- Ch. J. Encschede. 2002. *Beginnselen Van Strafrecht*. Deventer: Kluwer.
- CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Cst Kansil, [Christine ST](#), [Palandeng](#), [Engelien R](#), , [Mamahit](#), [Godlieb N.](#), 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara

- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Dianti, F. 2024. *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHP (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Darji Darmodiharjo dan Sidartha, 2016, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
- Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Universitas Terbuka
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Faturrochman, 2002, *Keadilan Perspektif Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Frank Verbruggen dan Raf Verstraeten. 2009. *Strafrecht & Strafprocesrecht voor Bachelors*, Antwerpen: Maklu-Uitgevers nv
- Hans Kelsen. 2019. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia
- Heri Tahir. 2010. *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (cetakan pertama)*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- J.J.H. Bruggink. 1993. *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, Den Haag: Kluwer-Deventer.

- John Rawls. 1971. *A Theory Of Justice*, Cambridge: Harvard University
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana
- Kuat Puji Priyanto. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, Yogyakarta: Kanwa Publisher.
- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- M.Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Edisi kedua, Cetakan kelima belas.
- Ni'matul Huda. 2011. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusamedia
- O. Notohamidjojo. 2011. *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Roeslan Saleh. 1983. *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru.
- Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana Revisi 1*, Depok: Rajawali Press
- Riduan Syahrani. 2004. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni
- R. Soesilo. 1982. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Politeia
- Salim H.S. 2021. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Satjipto Rahardjo. 1992. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Jogjakarta: Cahaya Atma.
- Sudikno Mertokusumo dan Pitlo A. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Tim Mulgan. 2020. *Utilitarianism*, New York: Cambridge University Press
- Ujan, Andre Ata. 2001. *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta: Kanisius
- Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Wiryo Prodjodikoro. 1967. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung.
- Wirjono Projodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudur Hukum Perdata*, Yogyakarta: Mandar Maju
- Yoserwan. 2019. *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya Dalam Hukum Pidana Ekonomi)*. Padang: Andalas University Press.

Jurnal

- Aditya, Z. F., & Winata, M. R. 2018. *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)*. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 9(1), 79-100.
- Ahmad Sofian & Batara Mulia Hasibuan. ,2021, *Pengaturan Dan Praktek Praperadilan Tindak Pidana Pajak Di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 701-718.
- Andrianto, F, 2020. *Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia*. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114-123.
- Ariyanti, V. 2019. *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33-54.
- Bahrul Ulum, 2022, *PENGUJIAN KEWENANGAN ADMINISTRATIF DAN UPAYA PAKSA DIREKTORAT JENDERAL MELALUI MEKANISME PRAPERADILAN*. *Lex Lata*, 4(1).
- Fachrul Rozi. 2018. “*Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana*”, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1 No.2
- Faharudin, F, 2017. *Prinsip Checks and Balances Ditinjau Dari Sisi dan Praktik*. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(2), 115-128.

Ega Laksamana Triwiraputra, 2024

REFORMULASI PENGATURAN PEMINJAMAN BAHAN BUKTI GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA WAJIB PAJAK SEBAGAI TERPERIKSA

87

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

- Hamzah, A. 2013, Beberapa Hal Dalam Rancangan KUHAP. *Diktat Laporan FH UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, disampaikan Dalam Acara Peltihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini, Yogyakarta, 23-27.*
- Hiariej, E. O. S. 2021. *Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(1), 1-12.*
- Hiariej, E. O., & KUHAP, B. C. R. 2013. *Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Dalam Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional.*
- Hierarki, P. M., & Delegasi, O. R. 2021. *Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional.*
- Igor V. Kolosov dan Konstantin E. Sigalov, 2020, Was J. Bentham the First Legal Utilitarian?, *RUDN Journal of Law, 24(2), 438-471.*
- Ilyas, W. B. 2011. Kontradiktif sanksi pidana dalam hukum pajak. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 18(4), 525-542.*
- Inge Dwsvimiar, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum, 11(3), 522-531.*
- Irfani, N. 2020. *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(3), 305-325.*
- Juita, Subaidah Ratna., Amri Panahatan Sihotang, & Supriyadi, ,2020, *Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan. Jurnal Ius Constituendum, 5(2), 271-285.*

- Latifah, M. 2016. Penghapusan Tahapan Penyelidikan Dalam RUU Tentang Hukum Acara Pidana. *NEGARA HUKUM: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 4(1), 105-123.
- Moho, H. 2019. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Moh Rifa'i, 2018, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 23-35
- Muhtadi, M. 2011. *Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3).
- MUNIB, M. A. 2018. *Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 1(1), 60-73.
- Nurfaqih Irfani. 2020. *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305-325.
- Nurwidya Husma Wardhani, Tulus M. Lumban Gaol, Taufiqueohman Syahuri. 2024. *Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Relasi Publik*, 2(1), 123-130.
- Pangaribuan, L. M. 2017. *Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 21-29.
- Prianto, W. 2024. *Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 08-19.
- Sanyoto, S. 2008. *Penegakan hukum di indonesia*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199-204.

Shinta Agustina. 2015. *Implementasi asas lex specialis derogat legi generali dalam sistem peradilan pidana*. Masalah-Masalah Hukum, 44(4), 503-510.

Virginia, Erja Fitria, & Eko Soponyono. 2021, *Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(3), 299-311

Wantu, F. M. 2007. Antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 19(3).

Winarno, N. B. 2011. Beberapa permasalahan dalam penyelidikan Dan penyidikan oleh kepolisian. *Perspektif*, 16(2), 117-127.

Internet

Mahkamah Konstitusi. 2023. *Eddy Hiarij: Pemeriksaan Bukti Permulaan Merupakan Penerapan Sunrise Principle*. Diambil dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19617>

[https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengakuan tanggal 10 Februari 2022 Pukul 17.10 WIB](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengakuan_tanggal_10_Februari_2022_Pukul_17.10_WIB)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756)

Ega Laksamana Triwiraputra, 2024

REFORMULASI PENGATURAN PEMINJAMAN BAHAN BUKTI GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA WAJIB PAJAK SEBAGAI TERPERIKSA 90

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2024

Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sag

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN Sby

Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Pms

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bpp